

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah penelitian menarik yang disampaikan oleh David Kerr pada tahun 1999 bahwa di negara-negara Asia Tenggara “*citizenship education*” lebih menggambarkan pembelajaran kontinum “minimal” sebagai *education about citizenship* (Kerr, 1999). Kontinum merupakan rangkaian (KBBI, 2022) Kontinum merupakan sesuatu yang dianggap sebagai keseluruhan, struktur, rangkaian yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan (Kerr, 1999). Setiap ujung kontinum menampilkan karakteristik yang berlainan, yang mempengaruhi definisi, dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan (PKn). Kontinum minimal ditandai dengan definisi sempit kewarganegaraan, negara-negara di Asia Tenggara berusaha mempromosikan pemahaman tentang kepentingan eksklusif dan elitis tertentu. Eksklusif itu merupakan pendidikan kewarganegaraan yang terbatas pada satu pemahaman kelompok yang terpisah dari nilai-nilai masyarakat, sementara elitis hanya cenderung pada pembagian kalangan berdasarkan kualitas dari kemampuan, kecerdasan dari diri seseorang (Kerr, 1999).

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara berdasarkan penelitian David Kerr pada tahun 1999 menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia masih termasuk dalam kategori kontinum minimal. Hal ini diperkuat dengan fenomena yang masih sering terjadi di negara Indonesia, yaitu siswa lebih mengutamakan dirisendiri daripada hidup dalam kebersamaan, hal ini sering kita jumpai di sekolah dimana siswa

hanya memahami tentang pengetahuan namun ketika pulang sekolah pelajaran yang telah dipelajarinya tidak dilakukan di kalangan masyarakat atau diluar sekolah (Kerr, 1999).

Pendidikan Kewarganegaraan cenderung mengembangkan pembelajaran berbasis pada pengetahuan. PKN hanya berpusat pada aktivitas pendidikan formal yang berkonsentrasi pada transmisi pengetahuan dan menjadikan pengetahuan sebagai alat evaluasi yang utama. Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) itu bukan hanya kepada pengetahuan tapi ada terdapat sikap dan keterampilan. Dampaknya masih sering terjadi tawuran antar siswa yang mengakibatkan kurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Hal ini menyatakan bahwa peserta didik sekarang ini tidak mempunyai rasa kemampuan sosial yang baik. Apabila tertuju pada indeks persepsi korupsi, di negara indonesia saat ini berada di nilai 37 dengan ranking 102 dari 180 negara. Apabila tahun 2019 lalu indonesia berada pada nilai 40 dan ranking 85 maka tahun 2020 indonesia skornya turun 3 poin dari tahun 2019 lalu pada skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Menunjukkan bahwa intergenerasi nilai-nilai kewarganegaraan melalui pendidikan kewarganegaraan tidak berjalan dengan baik di indonesia (Ramadhan, 2021).

Hal ini terjadi karena pendidikannya berbasis pada proses pembelajaran yang hanya tertuju pada pengetahuan saja. Guru hanya memberikan sebuah penerangan yang berakibatkan siswa sering tidak paham apa yang telah dipelajari dan tidak mampu menerapkannya pada kehidupannya sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh

(Winataputra, 2014) yaitu “pasa proses belajar dan mengajar serta pemberian nilai dalam pembelajaran PKn lebih tertuju pada dampak instruksional (*instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) dengan kata lain hanya tertuju pada sifat kognitifnya. sementara perkembangan dimensi yang lainnya belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Sementara di negara-negara Eropa tengah, selatan dan timur serta Australia di nilai berada di tengah kontinum sebagai *education through citizenship*. Ditengah kontinum berarti tidak berada pada kontinum maksimal dan kontinum minimal. Sedangkan di negara-negara Eropa utara, Amerika Serikat dan Selandia baru dinilai lebih mendekati titik “maksimal” sebagai *education for citizenship* (Kerr, 1999). Peta internasional tentang pendidikan kewarganegaraan (*civic education* dan *citizenship education*) yang diangkat oleh Winataputra (2014) dari berbagai studi yang relevan, memberi indikasi bahwa konsep dan paradigma pendidikan kewarganegaraan sangatlah dinamis karena berinteraksi dengan konteks utuh kehidupan masing-masing bangsa dan negara.

Hal ini di konfirmasi oleh tulisan (Cholisin, 2000) yang mengatakan bahwa selama itu kita pernah terjebak dalam paradigma lama pembelajaran PKn dimana dewasa ini perkembangan politik demokratis semakin menguat dan paradigma lama juga semakin dipertanyakan. Dalam paradigma lama atau pandangan lama kurikulum didefinisikan sebagai kewajiban atau beban mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Hal ini diperparah oleh pengalaman empirik PKn di persekolahan yang dirasakan sering terjadi tumpang tindih dan membosankan dikalangan siswa. Kebosanan itu

terutama disebabkan karena akar keilmuan PKn yang sangat lemah sehingga kalangan komunitas disiplin guru PKn merasakan kesulitan untuk mengembangkan rasa profesionalitasnya. Kondisi PKn yang memprihatinkan tersebut, menjadikan paradigma lama menjadi anomali bahkan PKn sempat mempermasalahkan keberadaan paradigma lama. Oleh sebab itu penting dicari sosok paradigma yang baru yang diharapkan oleh komunitas disiplin maupun yang relevan dengan Indonesia Baru.

Merespon hal itu, Kompas, 28 Februari 2003 (dalam Cholisin, 2000) juga mengungkapkan bahwa sekolah di Indonesia saat ini hanyalah memberikan kemampuan untuk menghafal, dan bukan untuk berpikir secara kreatif. Hasilnya pendidikan kita tidak punya makna. Untuk itu sekolah harus memenuhi tiga aspek pendidikan kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan secara fungsional antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat (*civic skill*), dan perkembangannya nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat (*civic virtue*). Pemahaman ini kemudian akan membawa peserta didik sebagai warga negara untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan warga negara, yang kemudian akan didukung dengan nilai-nilai kebajikan dalam masyarakat seperti saling menghargai, kepribadian, disiplin diri, toleransi, patriotisme dan tanggung jawab (Setiawan, 2021).

Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting dalam membentuk peserta didik seperti yang diharapkan selama ini. Pasal 1 Undang- Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU RI No 14 Tahun 2005). Karenanya guru dilengkapi dengan 4 kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Maka dari itu guru juga merupakan sosok yang digugu dan ditiru atau sebagai contoh bagi seorang siswa. Guru juga merupakan mediator untuk menyalurkan pendidikan kepada peserta didik di sekolah, guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas yang memberi bantuan serta dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang seperti yang dikemukakan (Handayani & Dewi, 2020).

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya beberapa masalah utama yang terjadi di sekolah peneliti jadikan objek penelitian. Pertama, ialah kurangnya rasa solidaritas dan korelasi antar para guru. Kedua, kurangnya rasa hormat siswa terhadap yang lebih dewasa dari mereka. Ketiga, siswa berani melawan guru karena mereka merasa lebih hebat dari para guru, lebih hebat disini yang dimaksud bukan dari segi ilmu melainkan dari segi power. Sudah jelas bahwa ada slogan yang mengatakan guru itu digugu dan ditiru, namun jika yang dicontohkan guru adalah perbuatan yang tidak baik maka juga tidak heran muridnya ada yang meniru.

Dari permasalahan tersebut diperlukan peran maksimal dari para guru terkhusus pada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pada umumnya hanya memberikan materi/menyampaikan materi kepada peserta didik,

hal itu masih kurang membangkitkan semangat peserta didik, seperti contoh yang sering kali kita temui kebanyakan guru itu menggunakan metode ceramah sehingga tidak heran jika PPKn di negara kita ini masih tahap minimal. Padahal guru PPKn mempunyai peran dan fungsi tersendiri apabila dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya. Guru PPKn tidak hanya bertugas mengajarkan dan menyampaikan ilmu yang dimiliki, akan tetapi guru PPKn juga harus menyisipkan nilai kehidupan sosial kepada siswa sehingga hal tersebut akan diimplementasikan langsung di kehidupan siswa itu sendiri. Untuk menunjang hal tersebut guru PPKn harus mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik dan benar, siswa juga harus dikontrol kondisi saat proses belajar dan hasil belajarnya.

Hal ini berdasarkan dari sifat dari PPKn itu sendiri yang berfokus pada akhlak dan tingkah laku masyarakat, sehingga guru PPKn memiliki peran sebagai pemberi contoh dan panutan yang nyata bagi siswa. Sejalan dengan itu, menegaskan bahwa peran guru PPKn sangat strategis untuk mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Karena PPKn merupakan mata pelajaran yang bertugas membentuk warga negara yang baik (*a good and smart citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta ikut berpartisipasi dalam berbagai unsur publik (*public good*).

Dengan kesadaran akan hak dan kewajibannya maka seorang warga negara diharapkan menjadi kritis, partisipatif dan bertanggung jawab. PPKn juga digunakan dalam membantu generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional serta mampu menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan

Negara (Sumantri, 2017).

Oleh karena itu objek studi *civics* merupakan warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, kebudayaan dan negara, yang termasuk dalam objek studi *civics* merupakan tingkah laku, tipe pertumbuhan berfikir, potensi yang ada pada setiap diri warganegara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (Patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral pancasila) dan usaha, kegiatan partisipasi, tanggung jawab (Akbal, 2016).

Menurut (Kerr, 1999) pembelajaran PPKn pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang maksimal yaitu mencakup *thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process-led, values-based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice* yang mencirikan pendekatan *education for citizenship* yaitu mencakup kedua pendekatan yang menitik beratkan pada proses membekali siswa dengan seperangkat alat pengetahuan dan keterampilan serta sikap nilai yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam peran dan tanggung jawab yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, pendekatan ini mengiatkan (*citizenship education*) dengan “*the whole education experience of students*” seluruh pengalaman pendidikan siswa (Kerr, 1999).

Dari uraian diatas penting sekali meninjau peran guru dalam menemukan pembelajaran yang mencirikan kontinum maksimal seperti yang disarankan oleh David Kerr, selain itu juga mencirikan paradigma baru yang diperlukan oleh guru PPKn. Oleh karena itu, menarik sekali untuk melakukan penelitian ini yang

berkaitan dengan peran guru dalam memaksimalkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini akan menelusuri dalam upaya guru untuk mencapai kontinum maksimal dari pembelajaran PPKn di sekolah. Selain itu, penelitian ini akan mendukung kajian pembelajaran PPKn yang maksimal pada ruang lingkup domain pedagogis PPKn yaitu menelusuri peran guru tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran PPKn itu secara maksimal. Berdasarkan hal-hal diatas maka penelitian “Peran Guru dalam Mencapai Kontinum Memaksimalkan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” menjadi penting untuk mengembangkan keilmuan kewarganegaraan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya permasalahan tersebut adapun hal-hal yang perlu di identifikasi masalah dalam pembuatan skripsi PPKn adalah:

1. Hasil penelitian David Kerr bahwa pembelajaran PPKn masih di tahap “minimal”.
2. Cholisin dalam penelitiannya mengatakan bahwa pembelajaran PPKn pernah terjebak pada paradigma lama
3. Integrasi nilai-nilai kewarganegaraan indonesia dalam pembelajaran PPKn yang maksimal
4. Pembelajaran PPKn yang masih berorientasi pada pengetahuan
5. Kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran PPKn
6. Pentingnya peran guru dalam pengelolaan pembelajaran PPKn di dalam kelas

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun batasan masalah yang diambil peneliti yaitu:

1. Peran guru dalam perencanaan pembelajaran PPKn
2. Peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn
3. Peran guru dalam evaluasi pembelajaran PPKn

1.4 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan dalam penelitian ini maka sangat perlu untuk dirincikan rumusan masalah pada penelitian ini rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran guru dalam perencanaan pembelajaran PPKn yang kontinum maksimal?
2. Bagaimana peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn yang kontinum maksimal?
3. Bagaimana peran guru dalam memaksimalkan evaluasi pembelajaran PPKn yang kontinum maksimal?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam perencanaan pembelajaran PPKn yang maksimal.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn yang maksimal.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam memaksimalkan evaluasi

pembelajaran PPKn.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang ini, ada dua macam manfaat penelitian yang ingin dicapai, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis;

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap ilmu pengetahuan dan sebagai motivasi bagi peneliti khususnya untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan keilmuan (*Body of Knowledge*) khususnya pada topik peran guru dalam mencapai kontinum maksimal pembelajaran PPKn. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam mendukung pengembangan domain pedagogis kajian PKn peran guru tentang bagaimana memadatkan pembelajaran PPKn itu secara maksimal.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Untuk guru atau calon guru, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk dapat dikembangkan dalam pembelajaran PPKn dalam hal memaksimalkan pembelajaran PPKn khususnya di SMA N 1 Percut Sei Tuan.